

PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN
PURWAKARTA



RENCANA KERJA TAHUN 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Veteran No.139 Purwakarta

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 telah kami selesaikan.

Dalam penyusunan RENJA Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2024 adalah agar DPMPTSP memiliki dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP untuk mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari dalam penyusunan RENJA 2024 ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Dokumen RENJA 2024 ini diharapkan dapat dijadikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijakan pada satu tahun anggaran kedepan.

Purwakarta, 31 Juli 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.,
NIP. 19790605 200501 1 013

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.3.1. Maksud.....	8
1.3.2. Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPTSP.....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta	32
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	45
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	46
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta	50
3.3. Program dan Kegiatan.....	56
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA	73
BAB V. PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Hasil Capaian Kinerja Tahun 2022	14
Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.....	15
Tabel 2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Terhadap Renstra Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s/d Tahun 2023 Kabupaten Purwakarta	22
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Utama DPMPTSP berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023	31
Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purwakarta	38
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta	45
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP.....	53
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta	63
Tabel 4.1 Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Purwakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	74

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 3.1 Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Tupoksi Perangkat Daerah.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2023 melalui tahapan – tahapan :

1) Persiapan penyusunan

Pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta TA 2024.

Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja 2022, pengendalian kegiatan tahun 2022 , dan RKPD 2024)

(2) Penyusunan rancangan awal

- Koordinasi dan Desk dengan pengampu kegiatan

(3) Penyusunan rancangan

- Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta TA 2024
- Masukan dari pelaksana kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

(4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

- Melaksanakan Bimbingan Teknis dengan Bappelitbangda.

(5) Perumusan rancangan akhir

- Penyempurnaan oleh Tim
- Diverifikasi oleh Kepala Dinas

(6) Penetapan.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta TA 2024 adalah penjabaran dari Renstra DPMPTSP Tahun 2024 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 serta menyelaraskan arah kebijakan Renja DPMPTSP

Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Selain itu dokumen lain yang dijadikan penyelarasan dalam penyusunan adalah Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang berfungsi menjabarkan, menerjemahkan serta mengoperasionalkan Renstra DPMPTSP 2024-2026 serta RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ke dalam program dan kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang memuat potensi, peluang dan kendala yang ada dengan tetap memperhatikan keterpaduan dan keterkaitan antara perencanaan, penetapan program dan penganggaran dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);

- 20) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 - 28) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 - 29) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 30) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 255 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
 - 31) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 32) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kabupaten

Purwakarta;

- 33) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
- 34) Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 43).
- 35) Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 Tanggal 27 Juli 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 92).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan perencanaan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Purwakarta selama satu tahun anggaran 2024 yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta sebagai bahan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini adalah untuk:

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 2) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah
- 3) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- 4) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- 5) Menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten dan LAKIP Perangkat Daerah, dan penyusunan laporan lainnya
- 6) Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun anggaran;

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kab. Purwakarta.

- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP KABUPATEN
PURWAKARTA

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kab.
Purwakarta
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP
KABUPATEN PURWAKARTA

BAB V
PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMPTSP

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun Anggaran, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappelitbangda, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka Kepala Perangkat Daerah menyampaikan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Tahun 2024 merupakan awal tahun pelaksanaan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, sehingga evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk rencana kerja pada tahun 2022 terhadap dengan Rencana Strategis 2018-2023 dan RPJMD 2018-2023. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah.

Pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan perizinan penanaman modal secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Purwakarta. Sehingga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan transparan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan pada 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja DPMPTSP Tahun 2022 dapat direalisasikan dengan predikat nilai capaian melebihi 100% atau tercapai melebihi target.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta berpedoman kepada Sasaran, indikator kinerja utama (IKU), program dan kegiatan yang tercantum pada dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan tujuan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis

DPMPTSP Tahun 2018-2023 dan RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui penerapan SPBE. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta didukung oleh 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) Indikator utama yaitu :

Tabel 2.1
Hasil Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	KET
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	70 Triliun	82.83 Triliun	Tercapai 118,3 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,45	91.26	Tercapai 110,69 %

Sumber : DPMPTSP, Tahun 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 2 indikator yang diukur pada Tahun 2022, semuanya melebihi target, Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dengan ketercapaian sebesar 118,30% dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan ketercapaian sebesar 110,69%.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Parsial IV, DPMPTSP Kab. Purwakarta mendapatkan alokasi sebesar Rp. 13.288.076.369,- Adapun tingkat capaian realisasi program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 11.639.180.121,- atau tercapai sebesar 87,59%. Pencapaian tersebut didorong oleh :

1. Perencanaan kegiatan dan penganggaran yang sesuai
2. Pelayanan penanaman modal yang meningkat
3. Komitmen yang kuat dan kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan

Berikut tabel yang menggambarkan pencapaian kinerja anggaran Tahun 2022.

Tabel. 2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase
1	2	6	9	11
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	13.288.076.369	11.639.180.121	87,59
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.894.756.269	10.335.854.236	86,89
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.437.000	69.890.900	81,80
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	20.010.400	16.352.000	81,72
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	8.128.050	8.024.000	98,72
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	57.298.550	45.514.900	79,43
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.440.686.255	6.114.203.464	82,17
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	7.420.686.255	6.097.094.614	82,16

2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	10.000.000	9.011.000	90,11
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	10.000.000	8.097.850	80,98
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.599.296	16.179.200	97,47
2.18.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	-	-	-
2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	16.599.296	16.179.200	97,47
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	79.087.500	98,86
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	-	-	-
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	80.000.000	79.087.500	98,86
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	641.038.650	594.076.156	92,67
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	50.000.000	50.000.000	100,00
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	60.038.750	59.697.173	99,43
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	250.000.000	248.357.833	99,34
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	99.999.900	98.054.800	98,05

2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	6.000.000	5.000.000	83,33
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	50.000.000	20.000.000	40,00
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	100.000.000	88.226.350	88,23
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	25.000.000	24.740.000	98,96
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255.218.450	250.381.550	98,10
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	-	-	-
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	152.290.950	150.040.950	98,52
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	102.927.500	100.340.600	97,49
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.571.176.618	2.476.338.952	96,31
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	7.000.000	7.000.000	100,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	608.391.850	531.526.726	87,37
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	1.955.784.768	1.937.812.226	99,08
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.600.000	735.696.514	91,44

'2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	150.000.000	83.417.514	55,61
'2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	30.000.000	30.000.000	100,00
'2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	74.600.000	74.490.000	99,85
'2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	400.000.000	398.159.000	99,54
'2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	150.000.000	149.630.000	99,75
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	99.989.800	98.702.070	98,71
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	49.989.900	49.954.770	99,93
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	49.989.900	49.954.770	99,93
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	49.999.900	48.747.300	97,49
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	49.999.900	48.747.300	97,49
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	199.950.000	196.611.400	98,33
2.18.02.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	199.950.000	196.611.400	98,33
2.18.02.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	50.985.000	48.050.000	94,24

2.18.02.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	148.965.000	148.561.400	99,73
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	299.986.500	257.905.125	85,97
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	299.986.500	257.905.125	85,97
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	99.993.650	93.885.275	93,89
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	40.000.000	32.900.000	82,25
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	109.999.600	92.406.600	84,01
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	49.993.250	38.713.250	77,44
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	393.394.000	351.637.100	89,39
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393.394.000	351.637.100	89,39
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	-	-	-

2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	345.135.200	314.738.300	91,19
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	48.258.800	36.898.800	76,46
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	399.999.800	398.470.190	99,62
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	399.999.800	398.470.190	99,62
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	399.999.800	398.470.190	99,62

Pencapaian terhadap target kinerja sasaran sebagaimana telah disebutkan bukan berarti tanpa hambatan, adapun permasalahan dalam penanaman modal dan perijinan yang masih terjadi dan menjadi kendala dalam peningkatan kinerja DPMPSTSP tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Data potensi investasi yang tersedia kurang memadai.
- b) Implementasi insentif dan fasilitasi penanaman modal belum terwujud.
- c) Pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital belum maksimal.
- d) Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Kabupaten Purwakarta.

- e) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam bidang teknologi informasi dan teknis perizinan.
- f) Masih rendahnya digitalisasi dalam perizinan dan kesulitan implementasi *system online* pada Perizinan dan Non Perizinan diluar *OSS RBA*.

Permasalahan tersebut menjadi masukan serta acuan dalam penyusunan rencana kerja di Tahun 2024 ini sehingga dapat terakomodir dalam program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan berdasarkan tingkat pencapaian Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta terhadap target pada Renstra dan RPJMD Tahun 2018-2023 atas realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Terhadap Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s/d Tahun 2022
Kabupaten Purwakarta

Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah Tahun (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah;	Opini BB	Opini A	Opini BB	Opini AA	100%	Opini BB	Opini AA	100%
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	3	3	3	3	100%	3	3	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	1 Dokumen	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Administrasi Keuangan Yang Dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	65 Orang	65 Orang	65 Orang	100%	65 Orang	65 Orang	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	100%	28 Jenis	28 Jenis	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	32 Jenis	100%	32 Jenis	32 Jenis	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Jenis	18 Jenis	18 Jenis	18 Jenis	100%	18 Jenis	18 Jenis	100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	10 Jenis	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Jumlah Orang yang Menerima Honorarium dan Tunjangan Non ASN	43 Orang	43 Orang	43 Orang	43 Orang	100%	43 Orang	43 Orang	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kualitas Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	100%

Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	100%	60 Unit	60 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Minat Penanaman Modal	390 Investor	360			100%	390 Investor		100%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal di Kabupaten Purwakarta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Penyajian Data Potensi Investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	8 Event				100%	8 Event		100%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal di Kabupaten Purwakarta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	82.5				100%	82.5	94	100%

	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	864 Pelaku Usaha	100%						
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	90	90	90	90	90	100%
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiatan	100%						
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang	100%						
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5 Kegiatan Usaha	100%						
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Purwakarta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	80	80	80	80	80	80	80	100%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200	200	200	200	200	200	200	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	80	80	80	80	80	80	80	100%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100%	100%						
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi serta Data Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%						
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan	2 Aplikasi	100%	100%	100%	100%	2 Aplikasi	100%	100%
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	500 dokumen	100%	100%	100%	100%	500 dokumen	100%	100%
	Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	2 Dokumen	100%	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah dalam peningkatan daya saing investasi secara nasional yang implementasinya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebijakan nasional lainnya yang mendukung peningkatan realisasi investasi secara nasional. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Purwakarta akan mendorong upaya kerjasama pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, pelaku usaha lokal dengan pengusaha regional, nasional, dan internasional dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan realisasi investasi, iklim investasi dan pengembangan inovasi daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah:

1. Peningkatan layanan dan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik.
2. Pencapaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN
3. Pelaksanaan perencanaan, promosi, kerjasama dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
4. Pelaksanaan perizinan usaha melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta monitoring berkala.
5. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan jemput bola / gempungan.
6. Melakukan inovasi pelayanan publik melalui Teras Madukara.
7. Memberikan kemudahan perizinan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta pada acara Gebyar NIB.
8. Memberikan Reward bagi para pengusaha yang taat memasukkan Laporan Kemajuan Penanaman Modalnya (LKPM).

9. Memberikan Reward dan punishment bagi ASN
10. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis
11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan secara berkala yaitu setiap pertriwulan.
12. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan database berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target RPJMD Perangkat Daerah					Realisasi Pencapaian					Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	
1	Persentase Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Purwakarta	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Tiliun	55	60	65	70	75	62,79	69,77	74,50	82,83	91,83*	Selalu Melebihi Target
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,30	82,35	82,40	82,45	82,5	84,39	85,59	87,78	91,26	91,07*	Selalu Melebihi Target

Sumber : DPMPTSP, 2023.

*Tahun 2023 : Nilai Triwulan II

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Isu-isu yang dipandang penting berkaitan dengan urusan penanaman modal adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah terkait Pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Purwakarta, sehingga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan transparan. Strategis dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pemberian award kepada pelaku usaha yang melaksanakan kepatuhan penanaman modal melalui ANVESTA Award, pengembangan/Upgrading *GASPOL* dan konten MPP Digital, dibentuknya Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam usaha untuk pencapaian kemudahan berusaha dan peningkatan realisasi investasi yang melibatkan semua bidang di Dinas PMPTSP dan lintas SKPD, lanjutan pelaksanaan forum penyelesaian masalah dan hambatan Investasi, komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kota/kabupaten, penyederhanaan regulasi investasi penanaman modal, peningkatan kompetensi melalui Diklat/pelatihan yang mengacu pada aktivitas unit layanan per bidang, kegiatan monitoring dan evaluasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang program dan kegiatan. Koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dan Kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga ditingkat pusat, dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan sudah bersinergi dengan mengacu kepada sasaran BKPM dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan kerjasama dalam peningkatan kemakmuran ekonomi dan adanya kegiatan Forum Koordinasi DPMPTSP yang dilakukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat provinsi yang diadakan setiap tahun.

2. Pengelolaan Data dan Informasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal, data merupakan aspek penting dalam urusan penanaman modal yang dapat memberikan dasar pengambilan keputusan baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan urusan penanaman modal belum tersedia secara lengkap dan akurat.
3. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang belum merata pada lokasi tujuan investasi terutama pada kawasan-kawasan industri tertentu

4. Penataan Regulasi

Cepatnya perkembangan aturan perundangan terkait urusan penanaman modal yang diikuti dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang beserta turunan Peraturan Pemerintah terkait urusan penanaman modal, memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait urusan penanaman modal dan perizinan berusaha. Hal ini menjada dasar DPMPTSP mendorong penataan peraturan peraturan perundang-undangan produk hukum daerah dalam rangka mempermudah penanaman modal yang dilakukan paling kurang dengan:

- a. Mereviu peraturan perundang-undangan produk hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dibidang penanaman modal;
- b. Melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan produk hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dibidang penanaman modal bidang penanaman modal; dan
- c. Menyusun peraturan peraturan perundang-undangan produk hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dibidang penanaman modal dalam rangka mempermudah penanaman modal dengan memperhatikan

perlindungan lingkungan hidup dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

5. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha perlu didorong dengan peningkatan pelayanan investasi untuk percepatan perizinan berusaha dan penyerapan tenaga kerja.
6. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
7. Perkembangan politik nasional dan internasional dapat berimbas terhadap penurunan realisasi investasi dikarenakan banyak investor yang menunggu dan selektif dalam menanamkan modalnya.
8. Pelambatan perekonomian dunia yang menyebabkan kenaikan tingkat inflasi di berbagai negara termasuk di Indonesia yang menyebabkan menurunnya pendapatan sehingga mendorong peningkatan pengangguran dan kemiskinan

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dinas adalah sebagai berikut ;

1. Kebijakan anggaran pada DPMPTSP belum dapat memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang.
2. Perkembangan dunia digital harus diaplikasikan pada proses pelayanan investasi dan perizinan yang terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik;
3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem *online single submission* berbasis resiko atau *OSS Risk Based Assesment* yang telah

dilaksanakan dari Tahun 2021 lalu masih menyisakan beberapa permasalahan yang cukup serius, sehingga diperlukan penyelesaian yang komprehensif melibatkan pemerintah pusat dan provinsi.

4. Tingkat upah yang tinggi berpotensi berpindahnya para pelaku usaha dari Kabupaten Purwakarta
5. Isu-isu mengenai kepegawaian seperti penataan jabatan fungsional dan pegawai honorer berpotensi mengurangi kinerja dinas. Belum adanya aturan peraturan perundangan perihal Jabatan Fungsional Penata Perizinan dan Penata Kelola Penanaman Modal yang menyebabkan belum selarasnya peta jabatan dan analisis jabatan/analisis beban kerja, sehingga kuantitas dan kualitas hasil kerja belum memenuhi harapan pimpinan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Pada tahun 2024 program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta

mengalami perubahan yang harus disesuaikan dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD Kab. Purwakarta sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian akan di sinkronisasi dengan Penetapan RKPD Kab. Purwakarta sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif dijadikan rencana kerja tahun 2024.

Mengacu kepada RKPD Kabupaten Purwakarta, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh DPMPSTSP Kabupaten Purwakarta terdiri dari 6 (enam) program, 14 Kegiatan dan 40 Subkegiatan, berikut matrikulasi reuiu program, kegiatan dan subkegiatan terhadap RKPD Tahun 2024

Tabel 2.5
Review terhadap Penetapan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Purwakarta

Nama : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024		
		Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.194.823.196,00					13.194.823.196,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				13.194.823.196,00					13.194.823.196,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	Predikat BB 100%	11.801.503.096,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	Predikat A 100%	11.801.503.096,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	55.437.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	55.437.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	5 Dokumen	20.010.400,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	5 Dokumen	20.010.400,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	8.128.050,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	8.128.050,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	5 Dokumen	27.298.550,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	5 Dokumen	27.298.550,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Administrasi Keuangan Yang Dilaksanakan	Kab. Purwakarta	3 kegiatan	7.440.686.255,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Administrasi Keuangan Yang Dilaksanakan	Kab. Purwakarta	3 kegiatan	7.440.686.255,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	58 Orang	7.420.686.255,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	58 Orang	7.420.686.255,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	1 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	1 Laporan	10.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	3 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	3 Laporan	10.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	100%	16.599.296,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	100%	16.599.296,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	12 Laporan	16.599.296,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	12 Laporan	16.599.296,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Aparatur	Kab. Purwakarta	100%	110.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Aparatur	Kab. Purwakarta	100%	110.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Purwakarta	1 Paket	30.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Purwakarta	1 Paket	30.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Purwakarta	85 Orang	80.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Purwakarta	85 Orang	80.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	100%	641.038.650,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	100%	641.038.650,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	50.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	60.038.750,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Purwakarta	1 Paket	60.038.750,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta	10 Paket	250.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta	10 Paket	250.000.000,00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Purwakarta	20 Paket	99.999.900,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Purwakarta	20 Paket	99.999.900,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Purwakarta	5 Dokumen	6.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Purwakarta	5 Dokumen	6.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	2 Laporan	50.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	2 Laporan	50.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	12 Laporan	100.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	12 Laporan	100.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	25.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	25.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	100%	255.218.450,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	100%	255.218.450,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Purwakarta	10 Unit	152.290.950,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Purwakarta	10 Unit	152.290.950,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Purwakarta	10 Unit	102.927.500,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Purwakarta	10 Unit	102.927.500,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	100%	2.462.935.074,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	100%	2.462.935.074,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	12 Laporan	7.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta	12 Laporan	7.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purwakarta	12 Laporan	608.391.850,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purwakarta	12 Laporan	608.391.850,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta	40 Laporan	1.847.543.224,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta	40 Laporan	1.847.543.224,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kualitas Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	100%	819.588.371,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kualitas Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	100%	819.588.371,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Purwakarta	20 Unit	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Purwakarta	20 Unit	150.000.000,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Purwakarta	4 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Purwakarta	4 Unit	30.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	Kab. Purwakarta	465 Unit	89.588.371,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)</i>	Kab. Purwakarta	465 Unit	89.588.371,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purwakarta	2 Unit	400.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purwakarta	2 Unit	400.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purwakarta	2 Unit	150.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purwakarta	2 Unit	150.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	390 Investor	99.989.800,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	390 Investor	99.989.800,00
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal di Kabupaten Purwakarta	Kab. Purwakarta	100%	49.989.900,00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Minat Pelaku Usaha untuk Menanamkan Modal di Kabupaten Purwakarta	Kab. Purwakarta	100%	49.989.900,00
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	29.989.900,00	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik)	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	29.989.900,00
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	20.000.000,00	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	20.000.000,00

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota (Dokumen)	Kab. Purwakarta	2 Dokumen	49.999.900,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota (Dokumen)	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	49.999.900,00
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	20.000.000,00
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	29.999.900,00	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	29.999.900,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	199.950.000,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	199.950.000,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Purwakarta	2 Dokumen	199.950.000,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Purwakarta	2 Dokumen	199.950.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	148.965.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	148.965.000,00
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	50.985.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	1 Dokumen	50.985.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga kerja (presentase)	Kab. Purwakarta	18,50	299.986.500,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga kerja (presentase)	Kab. Purwakarta	18,50	299.986.500,00
	Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	95,41			Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	95,41	
	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	Kab. Purwakarta	100%			Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	Kab. Purwakarta	100%	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (Laporan)	Kab. Purwakarta	4 Laporan	299.986.500,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (Laporan)	Kab. Purwakarta	4 Laporan	299.986.500,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota (laporan)	Kab. Purwakarta	5 Kegiatan Usaha	49.993.250,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota (laporan)	Kab. Purwakarta	5 Kegiatan Usaha	49.993.250,00
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Purwakarta	600 Pelaku Usaha	109.999.600,00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Kegiatan Usaha)	Kab. Purwakarta	600 Pelaku Usaha	109.999.600,00
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Kab. Purwakarta	50 Orang	99.993.650,00	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Kab. Purwakarta	50 Orang	99.993.650,00
Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporandi Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Kab. Purwakarta	200 Kegiatan	40.000.000,00	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporandi Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	Kab. Purwakarta	200 Kegiatan	40.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala (Persentase)	Kab. Purwakarta	7,14	393.394.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab. Purwakarta	7,14	393.394.000,00
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Purwakarta	3 Dokumen	393.394.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kab. Purwakarta	3 Dokumen	393.394.000,00
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Purwakarta	22 Kegiatan Usaha	59.400.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Purwakarta	22 Kegiatan Usaha	59.400.000,00
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Purwakarta	351 Pelaku Usaha	241.794.000,00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Purwakarta	351 Pelaku Usaha	241.794.000,00

Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Purwakarta	12 Kegiatan Usaha	92.200.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Purwakarta	12 Kegiatan Usaha	92.200.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab. Purwakarta	100%	399.999.800,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab. Purwakarta	100%	399.999.800,00
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi serta Data Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Purwakarta	100%	399.999.800,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi serta Data Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Purwakarta	100%	399.999.800,00
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Purwakarta	3 Dokumen	399.999.800,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Purwakarta	3 Dokumen	399.999.800,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta merupakan paduan perencanaan yang bersifat *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPD, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui musrenbang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dari Hasil usulan masyarakat yang dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan ataupun penjaringan usulan lainnya yang dapat diselaraskan dengan sasaran dan tujuan serta program dan kegiatan Dinas.

Tabel. 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun
2024 pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Perizinan di Tempat	Kec. Purwakarta	Jumlah Usaha yang Mendapatkan Pelayanan	Setiap Minggu	Diakomodir dengan gempungan / sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Renstra BKPM Tahun 2020-2024 sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu: 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal; 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024.

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

merupakan landasan dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen izin dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya.

Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan dan startegi yang akan dilakukan pada masing masing arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024 yaitu:

- 1) Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman

modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (*investor needs*);
 - b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
 - c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal;
 - d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal;
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal;
 - f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020 – 2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja;
- b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal;
- c. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
- d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar;
- e. Meningkatkan penanaman modal pada industry yang berorientasi ekspordan industri substitusi impor;
- f. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar;
- g. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya alam di dalam negeri.

Dalam perencanaan rumusan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun

2024, peningkatan realisasi investasi dengan memanfaatkan inovasi menjadi fokus utama sejalan dengan kebijakan BKPM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, yang merupakan penjabaran dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, tema pembangunan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Adapun Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

” MENINGKATKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH”

Adapun arah kebijakan pembangunan dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 antara lain :

1. Peningkatan Kualitas SDM
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
6. Peningkatan Infrastruktur Daerah
7. Reformasi Birokrasi
8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dalam merespon permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, maka berdasarkan tema pembangunan dan arah kebijakan yang telah dirumuskan diatas, telah disusun prioritas pembangunan daerah Kab. Purwakarta Tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Pengembangan Koperasi dan UMKM
5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

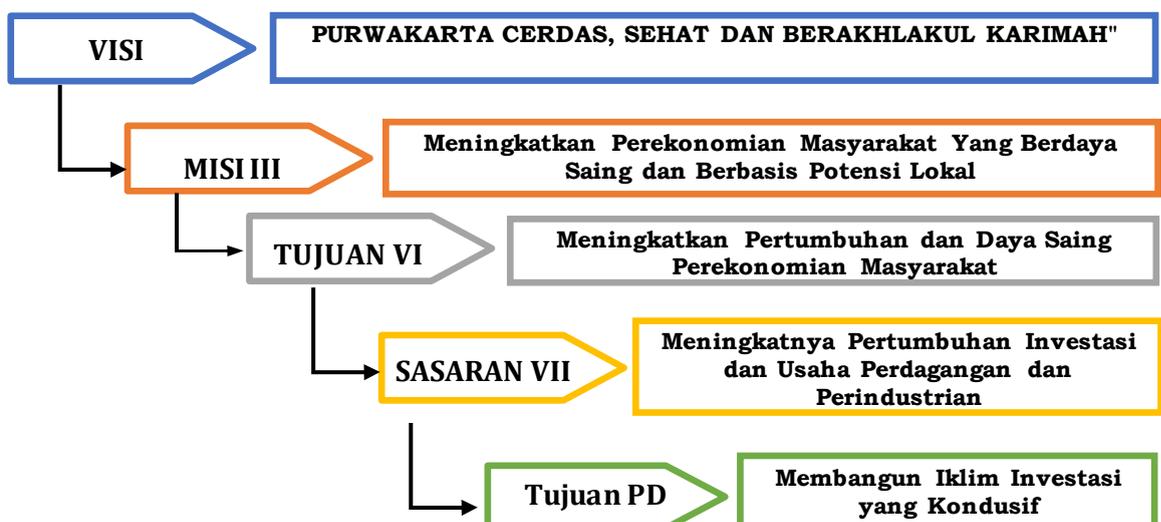
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual. Visi tersebut ditunjang oleh beberapa misi, salah satu misi yang pelaksanaannya didukung oleh DPMPTSP adalah Misi Ketiga yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal dan Misi Kelima Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat. Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sebagaimana dapat dilihat dari gambaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Tugas, Pokok dan Fungsi DPMPTSP di bawah ini :

Gambar 3.1

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan
Tupoksi Perangkat Daerah





Tujuan adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPSTP Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yaitu;

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DPMPSTP

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif	Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN (persen)	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Purwakarta telah merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang, adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatkan Perencanaan Penanaman Modal Terintegrasi Yang Berbasis Kepentingan Nasional dan Sesuai Kebutuhan Penanaman Modal
2. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing
3. Meningkatkan Efektifitas, Promosi Penanaman Modal
4. Meningkatkan kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan dan Nonperizinan
6. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sedangkan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Purwakarta dalam rangka Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel antara lain :

1. Peningkatan Sebaran Penanaman Modal Yang Berkualitas Sesuai Keunggulan dan Karakteristik Wilayah.

2. Meningkatkan Peran PMDN Khususnya UMK.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
4. Peningkatkan Rencana Pengembangan Penanaman Modal Yang Dilakukan Berdasarkan Sektor.
5. Melaksanakan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penanaman Modal di Daerah.
6. Melaksanakan Potensi Penanaman Modal Daerah Dalam Upaya Untuk Memberikan Informasi Yang Valid dan *Up-to-date*.
7. Memberdayakan Pelaku Usaha Daerah Khususnya UMKM.
8. Meningkatkan Kemitraan antara Perusahaan Besar dengan UMKM.
9. Mengusulkan Insentif Penanaman Modal di Daerah.
10. Memfasilitasi dan Pengawasan Minat Investasi Besar dan Prioritas di Daerah.
11. Mengoptimalkan Pemanfaatan Seluruh Promosi Berupa Event dan Platpon Digital Yang Mempertemukan Investor, Inovator dan Investor dengan Pelaku Usaha Daerah dan UMK.
12. Mengoptimalkan Bimbingan Pelaksanaan Penanaman Modal

Secara Intensif.

13. Menyelesaikan Permasalahan dan Hambatan Yang dihadapi Perusahaan dengan Melibatkan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
14. Meningkatkan Pengawasan Realisasi Penanaman Modal dengan Menggunakan Teknologi Informasi.
15. Mengoptimalkan Pemanfaatan OSS untuk mendukung Fungsi Pengendalian dalam Rangka Meningkatkan KetaatanPerusahaan Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
16. Reformasi Birokrasi.
17. Meningkatkan Digitalisasi Pelayanan Perizinan Berusaha .
18. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pelayanan dan Calon Penanam Modal Dalam Pemanfaatan OSS.
19. Meningkatkan Pemantauan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha.
20. Meningkatkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten

Purwakarta Tahun 2024 disamping mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang / Forum Perangkat Daerah, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
- b. Pencapaian MDGs dan IPM;
- c. Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan;
- d. Kebijakan Pusat dan Provinsi dalam penanaman modal;
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- f. Rencana Aksi MCP Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan komponen penunjang keberhasilan pembangunan tersebut akan dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPD Kabupaten Purwakarta dan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024, dimana program dan kegiatan Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan yang mendukung Indikator kinerja program :

Jumlah Minat Penanaman Modal. Kelompok sasaran program : Seluruh pelaku usaha pelaksanaan program, kegiatan yang akan dilaksanakan ;

- Perda Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota :
 - Penyusunan Perda Rencana Umum Penanaman Modal
 - Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi

2. Program Promosi Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Jumlah Promosi Penanaman Modal dan Diselenggarakan.

Kelompok sasaran program : Seluruh Masyarakat dan Pelaku Usaha.

kegiatan yang akan dilaksanakan yang mendukung pelaksanaan program :

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota :

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal; promosi pameran investasi, ANVESTA, vidiografi dalam rangka promosi investasi.
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan dan Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Kelompok sasaran : Seluruh Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program :

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah; Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka perizinan jemput bola /Gempungan /Gebyar NIB atau pemberian fasilitas insentif lainnya.
- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Pelayanan dan pendampingan Perizinan Berusaha.
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan pelayanan.
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Persentase PMA dan PMDN yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala.

Kelompok sasaran : Pelaku Usaha PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya; Forum Penyelesaian Masalah.
- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha; Bimtek dan Sosialisasi.
- Pengawasan Penanaman Modal; Profiling, Inspeksi lapangan, *reward dan punishment* bagi pelaku usaha.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan. Kelompok sasaran : Seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Pengembangan aplikasi *GASPOL*, *MPP Digital*, pengembangan konten *Media online*, *Update server* dan Penyajian Data.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program : Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran.

Kelompok sasaran : Seluruh Unit Kerja di Internal Perangkat Daerah. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah;

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
								NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			13.194.823.196,00							13.194.823.196,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.194.823.196,00							13.194.823.196,00
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			13.194.823.196,00							13.194.823.196,00
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	A Predikat	11.801.503.096,00						A Predikat	11.801.503.096,00
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	55.437.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	-	55.437.000,00
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.00 Dokumen	20.010.400,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-		20.010.400,00

2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1.00 Laporan	8.128.050,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	8.128.050,00
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5.00 Laporan	27.298.550,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	27.298.550,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.440.686.255,00			-	-	-	-	7.440.686.255,00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	58.00 Orang/bulan	7.420.686.255,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	DANA PERIMBANGAN	-	-	-	-	7.420.686.255,00
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1.00 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-	-	10.000.000,00
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	3.00 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	10.000.000,00

2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	16.599.296,00				-	-	-	-	16.599.296,00
2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
		<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	12.00Laporan	16.599.296,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	16.599.296,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	110.000.000,00				-	-	-	-	110.000.000,00
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1.00 Paket	30.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	30.000.000,00
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	85.00 Orang	80.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	80.000.000,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	641.038.650,00				-	-	-	-	641.038.650,00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1.00 Paket	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	50.000.000,00
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1.00 Paket	60.038.750,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	60.038.750,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	10.00 Paket	250.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00
	2.18.01.2.06.0005											
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	20.00 Paket	99.999.900,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.999.900,00
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	5.00 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu										
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	2.00 Laporan	50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	200.00 Laporan	100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1.00 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	255.218.450,00			-	-	-	-	255.218.450,00
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										

			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	10.00 Unit	152.290.950,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		152.290.950,00
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	10.00 Unit	102.927.500,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		102.927.500,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.462.935.074,00			-	-	-	-	2.462.935.074,00
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12.00 Laporan	7.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12.00 Laporan	608.391.850,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		608.391.850,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	40.00 Laporan	1.847.543.224,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.847.543.224,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	819.588.371,00			-	-	-	-	819.588.371,00
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	20.00 Unit	150.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00

			<i>Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	1.00 Dokumen	29.989.900,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.989.900,00
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko										
			<i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>	1.00 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	49.999.900,00			-	-	-	-	49.999.900,00
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>	0.00 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</i>	1.00 Dokumen	29.999.900,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		29.999.900,00
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Minat Investasi berdasarkan Lokasi dan Sektor	7,9 Triliun	199.950.000,00						7,9 Triliun	199.950.000,00
			Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Diseenggarakan	2 Kegiatan							2 Kegiatan	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	199.950.000,00			-	-	-	-	199.950.000,00
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota</i>	1.00 Dokumen	148.965.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		148.965.000,00

	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	0.00 Dokumen	50.985.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.985.000,00
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang diterbitkan	94,58 Persen	299.986.500,00						95.58 Persen	299.986.500,00
			Nilai IKM	92,5 Poin							96.91 Poin	
			Rasio daya serap tenaga kerja	18,5 Persen							19.00 Persen	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	299.986.500,00			-	-	-	-	299.986.500,00
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah										
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	5.00Dokumen	49.993.250,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		49.993.250,00
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik										
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	600 Pelaku Usaha	109.999.600,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		109.999.600,00
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko										
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	50 Pelaku Usaha	99.993.650,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.993.650,00
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko										

			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	200 Kegiatan Usaha	40.000.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	393.394.000,00						8.70 Persen	393.394.000,00
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	393.394.000,00			-	-	-	-	393.394.000,00
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya										
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	22 Kegiatan Usaha.	59.400.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-	-		59.400.000,00
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha										
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	351 Pelaku Usaha	241.794.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-	-		241.794.000,00
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal										

			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ;serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	12 Kegiatan Usaha	92.200.000,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	-	-		92.200.000,00
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	399.999.800,00						100.00 Persen	399.999.800,00
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	399.999.800,00			-	-	-	-	399.999.800,00
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik										
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	3.00 Dokumen	399.999.800,00	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Nagri Kaler	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		399.999.800,00
J U M L A H					13.194.823.196,00						13.194.823.196	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA

Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengacu Kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5.-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Renstra BKPM, Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Renstra DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Tahun 2022. Dengan mengacu hal-hal tersebut di DPMPTSP Kab. Purwakarta telah merumuskan 6 (enam) Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan beserta kerangka pendanaan indikatif. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta yaitu .

Guna tercapainya target indikator kinerja DPMPTSP, telah dirumuskan kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN	Pagu Indikatif (Rp.)
		2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
		02.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL				13.194.823.196
Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan kualitas Pelayanan Informasi Penanaman Modal	02.18.02	Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal				99.989.800
		2.18.02.2.01	Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		49.989.900
		2.18.02.2.01.0001	Subkegiatan :Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1. Penyusunan Perda Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Perkada dan Kepda di Bidang Penanaman Modal	29.989.900
		2.18.02.2.01.0004	Subkegiatan : Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Kegiatan Usaha	Rekomendasi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang terkena harmonisasi	20.000.000
		2.18.02.2.02	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen		49.999.900

		2.18.02.2.02.0001	Subkegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Naskah Akademis RUPM 2025-2030	20.000.000
		2.18.02.2.02.0004	Subkegiatan : Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1. Penyusunan Peta Potensi Investasi berdasarkan sektor usaha 2. Matchmaking UMK-Perusahaan Besar	29.999.900
		02.18.03	Program : Promosi Penanaman Modal				199.950.000
		2.18.03.2.01	Kegiatan :Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		199.950.000
		2.18.03.2.01.0002	Subkegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1. Investment Summit 2. Investment Roadshow 3. Investment Hub 4. Investment Award 5. Videografi Promosi Investasi	148.965.000
		2.18.03.2.01.0003	Subkegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	Kajian Strategi Promosi dan <i>Branding Image Promotion</i>	50.985.000
		02.18.04	Program : Pelayanan Penanaman Modal				299.986.500
		2.18.04.2.01	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Laporan		299.986.500
		2.18.04.2.01.0005	Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kegiatan Usaha	Koordinasi dan Konsultasi dengan OPD, Pemprov dan Pemerintah Pusat	49.993.250

		2.18.04.2.01.0006	Subkegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	1. Pelayanan dan pendampingan pelaku usaha dalam pembuatan perizinan berusaha 2. Pembentukan Tim Percepatan Perizinan Berusaha dalam rangka kemudahan berusaha bagi pelaku usaha	109.999.600
		2.18.04.2.01.0007	Subkegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	Pemberian layanan konsultasi, pendampingan dan Sosialisasi/Diseminasi informasi penanaman modal	40.000.000
		2.18.04.2.01.0008	Subkegiatan : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaku usaha di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	40.000.000
		02.18.05	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				393.394.000
		2.18.05.2.01	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen		393.394.000
		2.18.05.2.01.0004	Subkegiatan : Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	22 Kegiatan Usaha	1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan 2. Forum Penyelesaian Masalah dan Hambatan 3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah dan Hambatan	59.400.000

		2.18.05.2.01.0005	Subkegiatan : Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	351 Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	241.794.000
		2.18.05.2.01.0006	Subkegiatan : Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	12 Kegiatan Usaha	1. Inspeksi Lapangan 2. Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 3. Pengawasan terintegrasi, Penganugerahan Perusahaan yang mematuhi pelaksanaan perizinan berusaha	92.200.000
		02.18.06	Program : Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				399.999.800
		2.18.06.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		399.999.800
		2.18.06.2.01.01	Subkegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	1. Pengolahan, evaluasi dan pelaporan perizinan penanaman modal 2. Pengembangan Web 3. Pengembangan Aplikasi Gaspol 4. Pengembangan MPP Digital 5. Penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi	399.999.800

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	02.18.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				11.801.503.096
		2.18.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	3 Dokumen		55.437.000
		2.18.01.2.01.01	Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		20.010.400
		2.18.01.2.01.06	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		8.128.050
		2.18.01.2.01.07	Subkegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen		27.298.550
		2.18.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan		7.440.686.255
		2.18.01.2.02.01	Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang / Bulan		7.420.686.255
		2.18.01.2.02.05	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		10.000.000

		2.18.01.2.02.07	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan		10.000.000
		2.18.01.2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Dinas Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan		16.599.296
		2.18.01.2.03.05	Subkegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		16.599.296
		2.18.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan		110.000.000
		2.18.01.2.05.02	Subkegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket		30.000.000
		2.18.01.2.05.09	Subkegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang		80.000.000
		2.18.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	8 Kegiatan		641.038.650
		2.18.01.2.06.01	Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		50.000.000
		2.18.01.2.06.03	Subkegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		60.038.750

		2.18.01.2.06.04	Subkegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		250.000.000
		2.18.01.2.06.05	Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	20 Paket		99.999.900
		2.18.01.2.06.06	Subkegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Paket		6.000.000
		2.18.01.2.06.08	Subkegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan		50.000.000
		2.18.01.2.06.09	Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		100.000.000
		2.18.01.2.06.10	Subkegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		25.000.000
		2.18.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan		255.218.450
		2.18.01.2.07.05	Subkegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	10 Unit		152.290.950
		2.18.01.2.07.06	Subkegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	10 Unit		102.927.500
		2.18.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan		2.462.935.074
		2.18.01.2.08.01	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		7.000.000
		2.18.01.2.08.02	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		608.391.850

		2.18.01.2.08.04	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan		1.847.543.224
		2.18.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Kegiatan		819.588.371
		2.18.01.2.09.01	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		150.000.000
		2.18.01.2.09.05	Subkegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit		30.000.000
		2.18.01.2.09.06	Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	465 Unit		89.588.371
		2.18.01.2.09.09	Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		400.000.000
		2.18.01.2.09.10	Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		150.000.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPMPSTP Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Komitmen dan dukungan dari seluruh pihak di lingkungan DPMPSTP Kabupaten Purwakarta sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta guna terwujudnya sinergitas kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan di atasnya.

Harapan kami semoga Renja Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan reformasi Birokrasi dalam peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 31 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.,
NIP. 197906052005011013



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Telp. 0264-8224794 Purwakarta 41115

**PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (BNRI Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakartadan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI Tahun 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2014 nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2208 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

16. Peraturan Bupati Nomor 247 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
18. Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 2

Renja DPMPTSP Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan berpedoman pada RKPD 2024.

Pasal 3

Renja DPMPTSP Tahun 2024 disusun dengan sistematika uraian sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
- b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu
- c. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- d. Penutup

Pasal 4

Uraian Renja DPMPTSP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Renja DPMPTSP Tahun 2024 berfungsi sebagai :

1. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024;
3. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pembangunan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Tanggal : 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP.19790605 200501 1 013